

## From The Editors: Changing Geography and the Craft of History

It cannot be denied that when historians gaze upon the past, they gaze it with preconceived notions inculcated into them as a member of a particular society. The gaze seemed seamless and normal to the gazer, but in fact hides multiple power relations that are created through selective vision, categorization and other modes of knowledge production. It is very likely that the dominant gaze of the modern historian is what can be called as the national gaze; a gaze that was not created by the nation but in-fact by the state in its effort to materialize its nation-state. The dominance of this central and normal national gaze makes it difficult for people to contextualize their vision. Even further, this national gaze was pronounced as the main goal of Indonesian historian, as was discussed in the first National History Seminar in Indonesia held at Gadjah Mada University in 1957. They explicitly noted the development of history in Indonesia had the duty to develop the national historiography as part of nation-building. Although in the 1970s and 1980s there were efforts to introduce different gazes in the form of local history, the hegemony of the national history remains difficult to replace especially because these local gaze functioned within a national-local context. Thus the gaze was in line with the national one and has no subversive effect on the historiography.

The subversive function in the creation of new geographic regions is something that needs to be said. History develops because of the oppositions between perspectives/discourses/historiographies. These oppositions between differing gazes and narrations are a way for us to deepen our understanding of the past. The new geographic interest that have developed over these last several decades has allowed us to bring forth subversive reading towards the national geography and the gaze that follows it. Often, such gazes were old ones that were recontextualized into different areas allowing the change of narrative from nation-state into civilization, for instance, Fernand Braudel's gaze on Western civilization through the concept of the Mediterranean Sea is pulled to see a variety of watery geographic landscapes as connectors and creators of other civilizations; the Indian Ocean as a geographic concept of the Islamic civilization, the various studies on the riverine societies of the Ganges, Mekong, Yellow River and so forth. Studies on the borders and places outside of the 'state' had also become more developed in the forms of borderland studies or the Zomia that was traced first by James Scott. Our creativity as Indonesian historians is called forth for this challenge. We are not dealing mainly with the challenges of past knowledges but also with new geographies. The Indonesian islands are composed of a variety of borders and geographic features that have the potential to be a subversive act toward the national geography and gaze that have surrounded us for sometime.

## Pengantar Redaksi: Geografi yang Berubah dan Ilmu Sejarah

Tak dipungkiri bahwa sejarawan melakukan tatapan mereka terhadap masa lalu dengan dugaan-dugaan yang terpatritasi dalam didikan mereka sebagai anggota sebuah masyarakat. Tatapan tersebut tampak lumrah bagi yang menatapnya, tetapi sebenarnya tersembunyi didalamnya kekuasaan yang diciptakan lewat pandangan selektif, kategorisasi dan beragam bentuk produksi pengetahuan lainnya. Dugaan kuat yang mendominasi tatapan sejarawan modern adalah apa yang mungkin disebut sebagai tatapan bangsa; yaitu sebuah tatapan yang dibuat bukan oleh bangsa melainkan oleh negara dalam usahanya mengejawantahkan negara-bangsa. Dominasi tatapan bangsa ini sentral dan lumrah; orang kesulitan mempertanyakan seberapa kontekstual tatapan mereka. Lebih lanjut, tatapan bangsa ini dinyatakan sebagai tugas utama dari sejarawan Indonesia, seperti yang didiskusikan dalam Seminar Sejarah Nasional pertama Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada tahun 1957. Secara eksplisit pengembangan sejarah di Indonesia adalah untuk memajukan historiografi nasional sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Walaupun di tahun 1970an dan 1980an ada usaha untuk memperkenalkan tatapan baru dalam bentuk sejarah lokal, hegemoni wacana historiografi nasional tampaknya sulit untuk dihapus karena tatapan lokal tetap berfungsi dalam konteks lokal-nasional. Sehingga pandangan tersebut selaras dengan tatapan nasional dan tidak bersifat subversif terhadap historiografi tersebut.

Fungsi subversif dari penciptaan wilayah geografis baru ini merupakan sesuatu yang harus diakui. Sejarah itu bergerak maju karena adanya pertentangan antar pandangan/wacana/historiografi. Pertentangan antar-tatapan dan antar-narasi adalah salah satu cara yang memungkinkan kita memperdalam pemahaman akan masa lalu. Perkembangan geografi baru yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir ini memungkinkan membawa pembacaan subversif terhadap geografi nasionalis dan tatapan yang mengikutinya. Kadang bentuk tatapan itu merupakan tatapan lama yang ditempatkan pada kawasan berbeda agar narasi bisa bergeser dari negara-bangsa ke peradaban, sebagai contoh tatapan Fernand Braudel terhadap peradaban Barat lewat konsep geografi Laut Tengah (*Mediterranean*) ditarik untuk membahas beragam lanskap geografis air sebagai penghubung dan pencipta peradaban lainnya; laut Hindia sebagai konsep geografi peradaban Islam, beragam studi sungai Gangga, Mekong, Yangtze dan lain-lain. Selain itu juga studi tentang kawasan perbatasan dan tempat-tempat diluar 'negara' semacam studi-studi borderlands ataupun kawasan Zomia yang ditatap pertama kali oleh James Scott. Kreativitas kita sebagai sejarawan Indonesia seharusnya mendapat tantangan disini. Kita tidak hanya berurusan dengan tantangan masa lalu melainkan juga geografi baru. Kepulauan Indonesia itu terdiri dari beragam perbatasan dan fitur-fitur geografis yang punya potensi untuk melakukan subversi terhadap geografi nasional dan tatapan kebangsaan yang mengikutinya.